



# Mengungkap Bagaimana Pemerintah Daerah di Indonesia Membelanjakan Dana Anggaran Pendidikan

KAJIAN BELANJA PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN



THE PROMISE OF  
EDUCATION IN  
INDONESIA

*November 19, 2020*



THE WORLD BANK  
IBRD · IDA | WORLD BANK GROUP



Australian Government

# DAFTAR ISI

- 01** Mengapa kita memerlukan kajian belanja publik pemerintah daerah di bidang pendidikan?
- 02-05** Temuan Utama
- 06** Rekomendasi

# 01

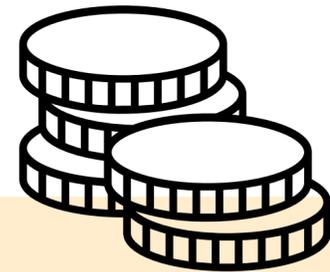
**Mengapa kita  
memerlukan kajian  
belanja publik  
pemerintah daerah di  
bidang pendidikan?**



**Belanja publik pemerintah daerah yang efektif dan efisien di bidang pendidikan merupakan kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan tujuan dalam pengembangan sumber daya manusia.**

Anggaran pendidikan mengalami kenaikan lebih dari 200 persen secara *real term* antara 2002-2018.

2020



**20%**

dari total pengeluaran pemerintah

**Rp. 508 Trilliun**

**60%**

dari anggaran pendidikan dikelola pemerintah daerah

Desentralisasi di Indonesia telah mengalihkan lebih banyak tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah.



**Belanja Gaji**

**PAUD**

**Infrastruktur**

**Pelatihan Guru**



# Sumber dan data analisa

**Data anggaran dan  
belanja pemerintah  
daerah dari  
Kementerian  
Keuangan**

2015-2018

**Data Pendidikan  
dari Kementerian  
Pendidikan dan  
Kebudayaan**

2015-2018

**Pengumpulan  
data**

informasi anggaran dan  
belanja secara terperinci  
dari 27 kabupaten/kota

# 02

**Bagaimana pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggarnya?**



# Perencanaan



**Kuantitas**



**Kualitas**

# Perencanaan



**Kuantitas**



**Kualitas**

## Program

Pemerintah daerah mempunyai banyak program pendidikan yang **sangat bervariasi**, ada beberapa pemerintah kabupaten / kota yang **melampaui mandatnya**.

# 03

**Berapa banyak anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pendidikan?**



# Alokasi Anggaran

Tidak semua pemerintah daerah sudah memenuhi mandat konstitusionalnya

**22%**

112 dari 508  
Kabupaten / Kota

**35%**

12 dari 34  
Provinsi

**Belum memenuhi mandat 20 persen**

# Pelaksanaan Anggaran

Dari semua pemerintah kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan 20% anggarannya untuk pendidikan, tidak semua dapat menggunakan anggaran sepenuhnya.

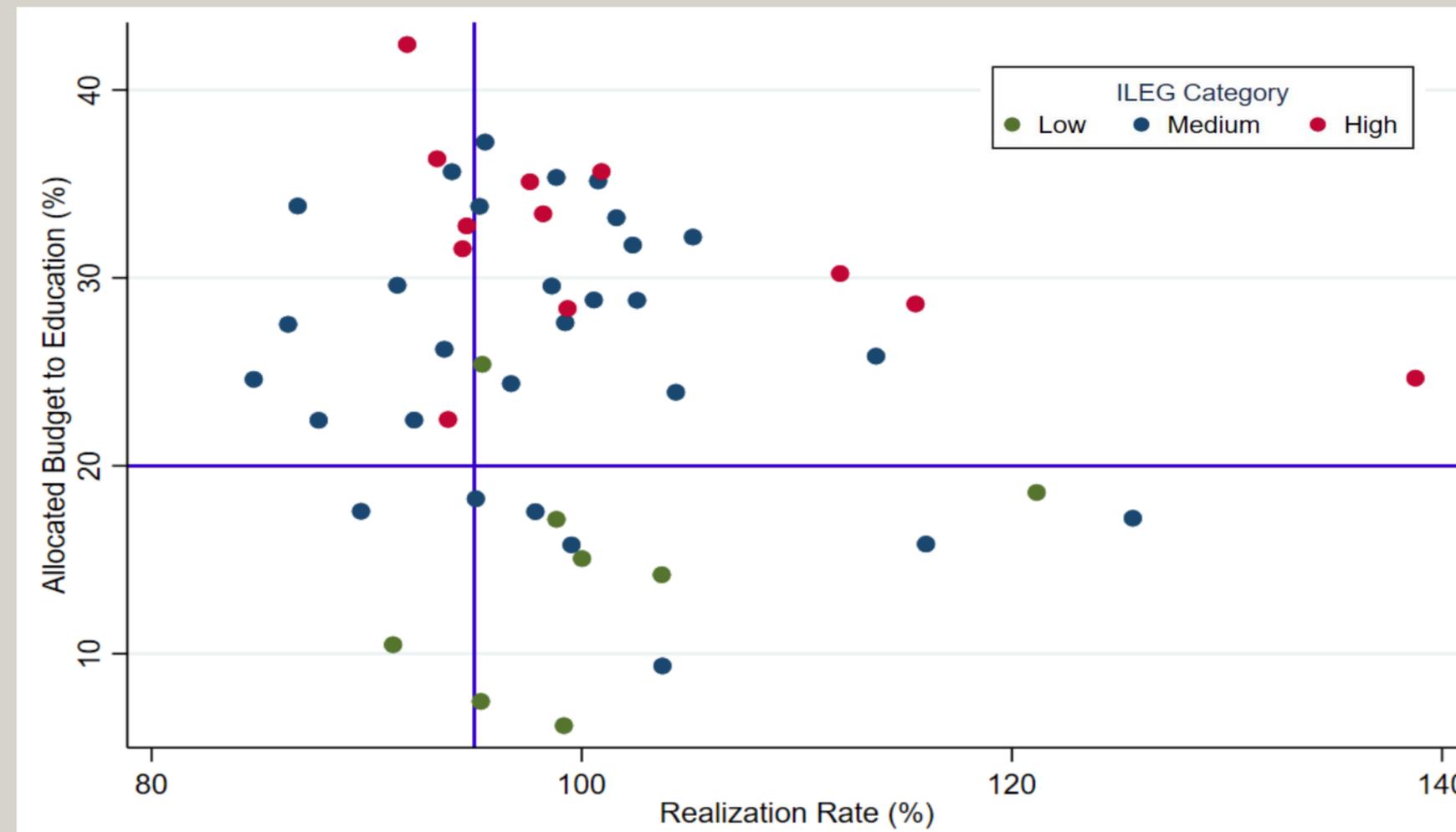
70%

Hanya 70% dari pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tingkat realisasi lebih dari 95%

# Kapasitas Pemerintah Daerah

Kabupaten / kota dengan standar tata kelola yang tinggi cenderung mengalokasikan minimal 20 persen dari anggarannya untuk pendidikan dan menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang tinggi.

Alokasi anggaran pendidikan dan tingkat realisasi berdasarkan indeks tata kelola pendidikan pemerintah daerah



# 04

**Bagaimana pemerintah daerah melaporkan pengeluaran pendidikan?**



# Klasifikasi Anggaran/Belanja

Sebagian besar klasifikasi anggaran/belanja belum terstandarisasi di seluruh kabupaten / kota dan provinsi, sehingga sulit untuk melakukan perbandingan dan analisis untuk mengambil keputusan/kebijakan yang lebih baik.

Kategori program dan kegiatan untuk gaji / tunjangan guru honorer

District	Range salary for non-PNS teacher paid by APBD	Local minimum wage	%	CoA Program category	CoA Activity category
Wonogiri	500,000	1,400,000	36%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penghargaan GTT dan PTT
Demak	300,000-1,200,000	2,065,000	58%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan bagi PTT dan GTT
Purworejo	450,000 - 800,000	1,300,000	35%-62%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal
Kab. Probolinggo	1,000,000	2,042,900	49%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Kab. Bojonegoro	250,000 - 1,000,000	1,858,000	13% - 54%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Honorarium/Tunjangan Kinerja GTT/PTT
Kab. Kotim	1,190,000	2,776,460	43%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Guru Kontrak
Kota Semarang	2,125,000 - 2,400,000	2,125,000	100% - 113%	Program Pelayanan Operasi Perkantoran/Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan/Pendampingan BOS
Kota Surabaya	3,580,000	3,580,000	100%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	BOSDA

# 05

**Bagaimana anggaran pendidikan dibelanjakan pada tingkat pemerintah daerah?**



# Pengeluaran Non-gaji

Belanja pendidikan di tingkat kabupaten / kota didominasi oleh pembayaran gaji guru PNS dan membatasi sumber dayanya untuk belanja non-gaji.

*de facto* dari belanja non-gaji sebesar

**14%**

dari total anggaran pendidikan

# Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah kabupaten / kota mengalokasikan hanya sedikit anggaran untuk pendidikan anak usia dini.

2.6%

Rata-rata, pemerintah kabupaten / kota hanya mengalokasikan 2,6% dari anggaran pendidikannya untuk PAUD

# Pendidikan Anak Usia Dini

Secara rata-rata pemerintah kabupaten/kota mempunyai alokasi

**500,000**  
**Rupiah**

per anak untuk anak prasekolah

12 dari 27 kabupaten/kota yang disurvei memiliki alokasi lebih rendah dari

**150,000**  
**Rupiah**

per anak untuk anak prasekolah

**Meskipun secara umum peningkatan anggaran pendidikan telah meningkatkan akses pendidikan, namun hanya memberikan kontribusi yang terbatas dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa.**

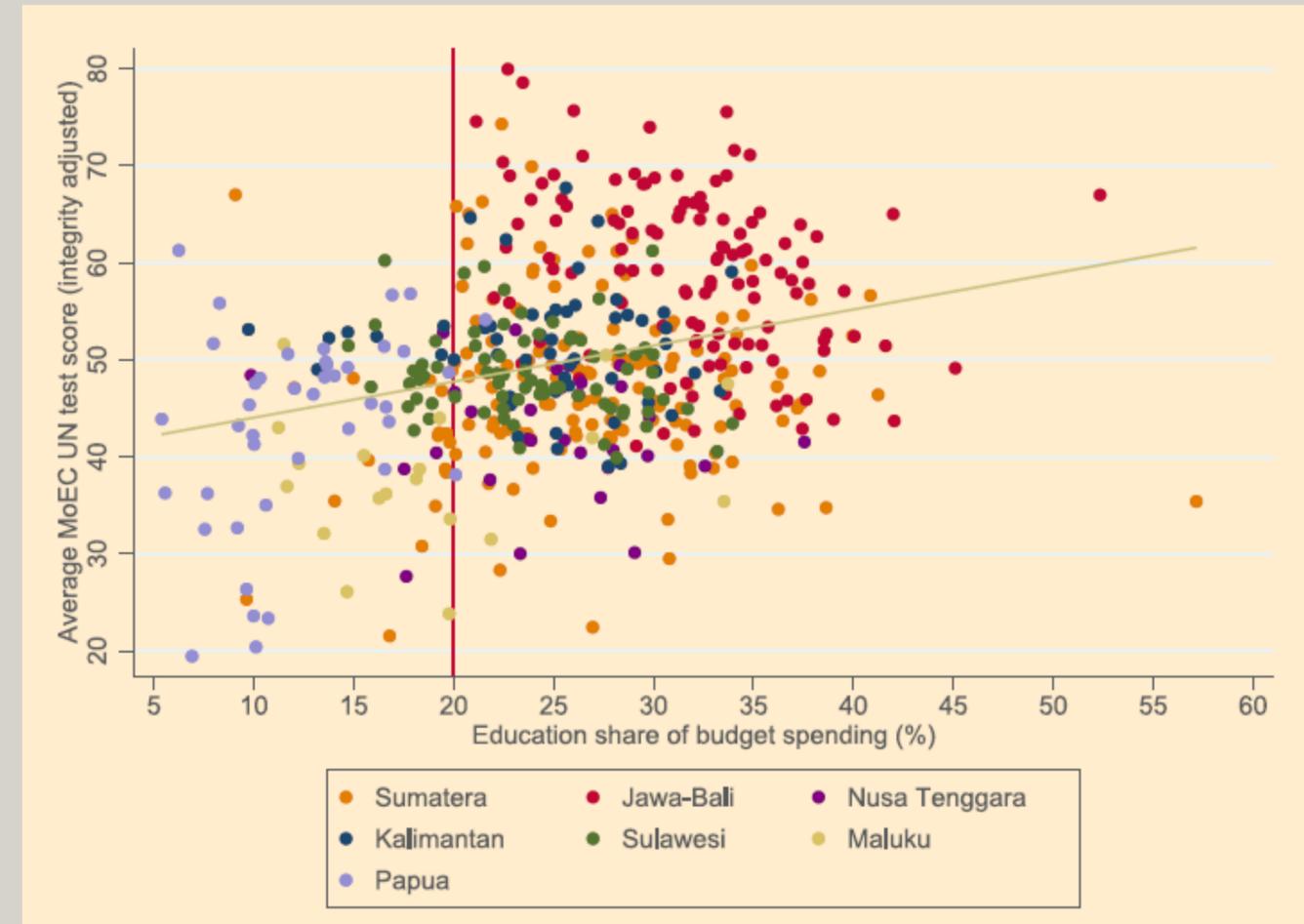
# Hasil Belajar Siswa

Di tingkat pemerintah daerah, hanya ada sedikit korelasi antara pengeluaran pendidikan dengan hasil belajar yang diharapkan.

Besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan mempunyai korelasi yang lemah dengan skor Ujian Nasional. Masih banyak ruang perbaikan yang dapat ditingkatkan di banyak kabupaten.

Analisis panel data tahun 2015-18 tidak secara konsisten menunjukkan adanya korelasi yang positif antara pengeluaran pendidikan per siswa dan hasil belajar siswa.

Alokasi anggaran pendidikan dan Skor Ujian Nasional (UN)



# 06

**Bagaimana agar pemerintah daerah dapat membelanjakan anggaran pendidikannya dengan lebih baik?**



# Rekomendasi

1

Peninjauan kembali kapasitas pemerintah daerah

2

Memprioritaskan program yang efektif

3

Menyederhanakan dan standarisasi klasifikasi anggaran

4

Memanfaatkan teknologi

# Peninjauan kembali kapasitas keuangan dan teknis pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan

~~ONE SIZE  
FITS ALL  
SOLUTION~~



Kabupaten / kota yang belum mengalokasikan minimal 20% anggarannya

Mebutuhkan pemantauan yang lebih ketat (untuk memenuhi mandat sebesar 20 persen dari anggaran).



Kabupaten / kota yang tingkat realisasinya rendah

Perlu peningkatan kapasitas dengan fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan Pendidikan.



Keseluruhan

Meninjau kembali kapasitas keuangan dan teknis masing-masing kabupaten / kota agar memiliki sumber daya yang diperlukan termasuk sumber daya non-gaji dan kemampuan teknis untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

# Konsolidasi dan memprioritaskan program pendidikan yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa

Pemetaan dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

Fasilitasi aksi breksi sosial kepemudaan

Pemilihan pemuda pelopor

Peningkatan mutu pengawas

Pengadaan baju seragam siswa miskin

Pemberdayaan anak putus sekolah

Pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda

Pembangunan taman, lapangan, fasilitas parkir  
Peningkatan dan pengembangan minat baca



## PEMBELAJARAN SISWA

# Menyederhanakan dan standarisasi klasifikasi anggaran

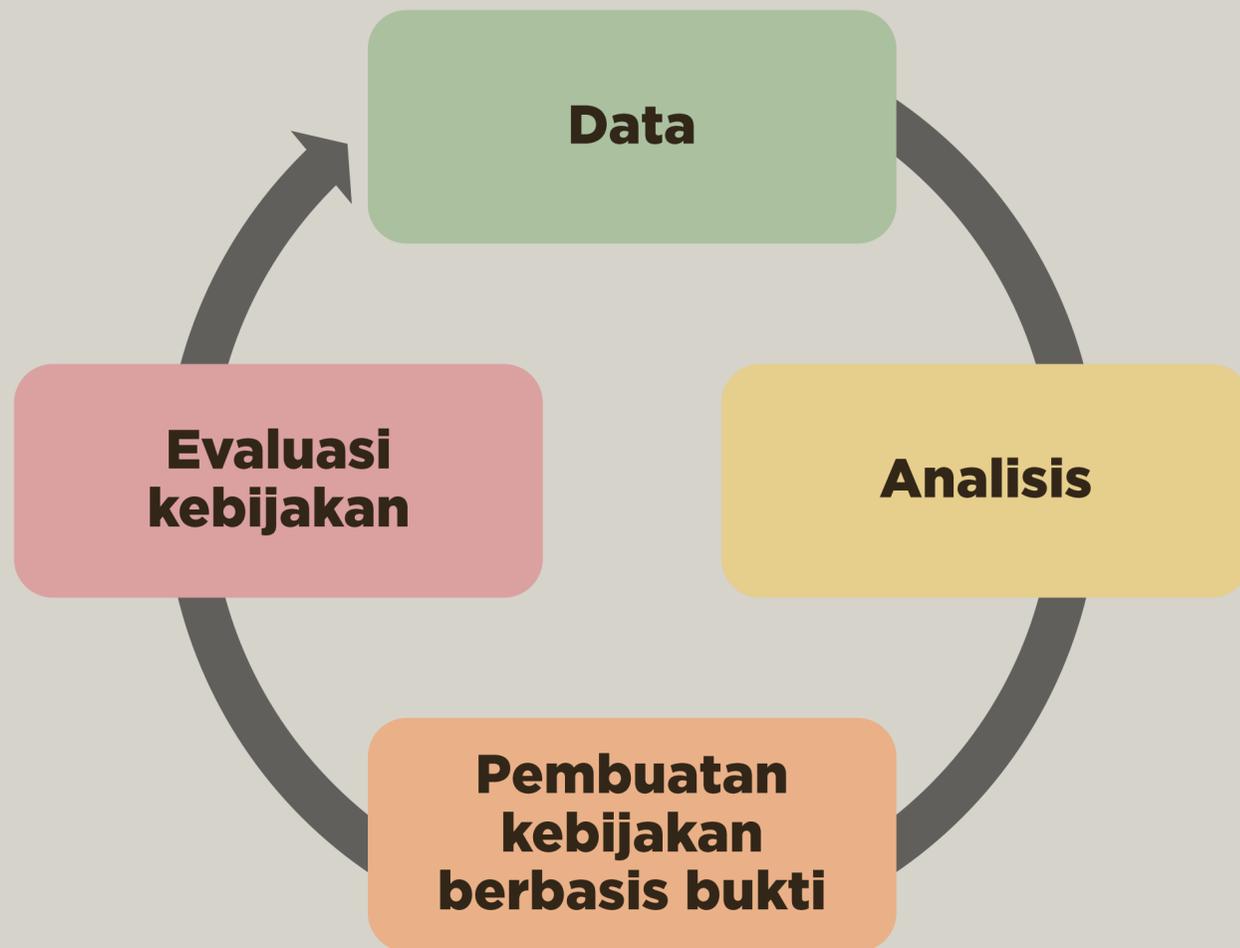


menghasilkan data dan statistik yang lebih baik dan dapat dibandingkan antar daerah



membantu pemerintah pusat dan daerah dalam melacak kemajuan dan memastikan bahwa keputusan/kebijakan diambil berdasarkan bukti

# Memfaatkan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas



Mengembangkan sistem manajemen data pendidikan yang terintegrasi

Menerbitkan indeks kualitas pendidikan untuk setiap daerah

Meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas lokal dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan

# Terima kasih!

Laporan lengkapnya dapat diakses di:  
<https://www.worldbank.org/indonesia/educationspending>



THE PROMISE OF  
EDUCATION IN  
INDONESIA



THE WORLD BANK  
IBRD · IDA | WORLD BANK GROUP



Australian Government